

BAHAN PAPARAN SAKIP TAHUN 2020
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA

Berikut rekomendasi dan tindaklanjut berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 700/97/Itp-III/INSP/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 :

No.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Memperbaiki keselarasan level indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah dengan indikator kinerja level Pemda dan keselarasan sasaran dan indikator kinerja eselon III dan IV	Telah dilaksanakan perbaikan keselarasan level indikator kinerja pada Renstra dan level Eselon II dan Eselon IV	Lampiran I
2.	Memperbaiki keselarasan Indikator Kinerja utama Utama (IKU) Pemda, sehingga IKU Perangkat Daerah merupakan turunan dari IKU Pemda atau tidak sama level indikator yang ditetapkan	Telah dilaksanakan perbaikan keselarasan IKU antara IKU Pemda dan IKU Perangkat Daerah	Lampiran I
3.	Menyusun Perjanjian Kinerja Staf secara menyeluruh terhadap seluruh staf/pegawai	Seluruh staf/pegawai telah membuat Perjanjian Kinerja	Bahan LAKIP 2020 (PK Staf)
4.	Hasil pengukuran capaian kinerja dari tingkat eselon IV ketas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i>	Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja.ntbprov.go.id dapat diakses oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> . Update capaian kinerja melalui aplikasi esakip2.ntbprov.go.id	www.e-kinerja.ntbprov.go.id www.esakip2.ntbprov.go.id
5.	Meningkatkan evaluasi atas program dan Rencana Aksi yang dapat menunjukkan perbaikan setiap periode dan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Telah dilakukan evaluasi melalui rapat bulanan dalam rangka perbaikan dan pencapaian target kinerja sesuai dengan kondisi aktual	Notulen Rapat Bulanan

B. PROGRES PERBAIKAN AKIP YANG TELAH DILAKUKAN

No.	PERBAIKAN AKIP	SEBELUM	SESUDAH
1.	Perbaikan keselarasan level indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah dengan indikator kinerja level Pemda dan keselarasan sasaran dan indikator kinerja eselon III dan IV	Sebelumnya hanya memasukkan satu indikator kinerja yaitu IKU yang diperjanjikan antara Esselon II dengan Gubernur	Perbaikan PK Eselon II menjadi 5 sasaran sesuai dengan kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 dan diturunkan secara berjenjang sesuai dengan level dan tanggungjawab
2.	Perbaikan keselarasan Indikator Kinerja utama Utama (IKU) Pemda, sehingga IKU Perangkat Daerah merupakan turunan dari	Sebelumnya hanya memasukkan satu indikator kinerja yaitu IKU yang	Perbaikan PK Eselon II menjadi 5 sasaran sesuai dengan kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 dan

No.	PERBAIKAN AKIP	SEBELUM	SESUDAH
	IKU Pemda atau tidak sama level indikator yang ditetapkan	diperjanjikan antara Esselon II dengan Gubernur	diturunkan secara berjenjang sesuai dengan level dan tanggungjawab
3.	Menyusun Perjanjian Kinerja Staf secara menyeluruh	Sebelumnya hanya staf Sekretariat	Seluruh Staf sudah membuat Perjanjian Kinerja
4.	Hasil pengukuran capaian kinerja dari tingkat eselon IV ketas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i>	Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja.ntbprov.go.id dapat diakses oleh Pimpinan Peranglat Daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	e-kinerja.ntbprov.go.id
5.	Meningkatkan evaluasi atas program dan Rencana Aksi yang dapat menunjukkan perbaikan setiap periode dan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	evaluasi melalui rapat triwulan dalam rangka perbaikan dan pencapaian target kinerja sesuai dengan kondisi aktual	evaluasi melalui rapat bulanan dalam rangka perbaikan dan pencapaian target kinerja sesuai dengan kondisi aktual

C. PERUBAHAN STRATEGI ATAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa hal yang telah dilaksanakan :

1. Melaksanakan penyesuaian jadwal masuk kerja yang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan aturan jadwal kerja normal menjadi bergilir sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/125/ORG tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemnyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir Surat Edaran Nomor 060/186/ORG tanggal 12 Mei 2020. Memastikan perubahan pelaksanaan kegiatan tidak berpengaruh pada pelayanan terkait perizinan sektor ESDM.
2. Melakukan realokasi anggaran Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dengan merevisi target kinerja dan jadwal dalam Rencana Aksi yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

D. CASCADING (Pohon Kinerja)

Cascading (Pohon Kinerja) dapat dilihat pada Lampiran II

E. CROSSCUTTING PROGRAM/KEGIATAN

Terkait dengan adanya realokasi anggaran pada Dinas ESDM Provisni NTB, tidak terjadi *Crosscutting* Program/Kegiatan.

Mataram, Agustus 2020

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

LAMPIRAN I

PERBAIKAN KESELARASAN LEVEL INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA ANTARA ESELON III DAN ESELON IV

A. SEBELUM PEBAIKAN

Sebelumnya pada Renstra terdapat tujuh tujuan dengan memasukkan semua program pendukung dengan tidak memberikan keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD dan turunannya hingga ke level Eselon III dan IV dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan bidang ESDM yang akuntabel	Nilai LKJIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	Nilai LKJIP	B	B	B	B	BB
2	Terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i>	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
4	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Cakupan masyarakat yang dapat akses air tanah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih (KK)	2040	255	255	255	425
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang ESDM dalam rencana pembangunan daerah	Jumlah indikator kinerja daerah sektor ESDM dalam RPJMD	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan bidang ESDM	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	85	90	93	97	100
6	Terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (%)	3	3	3	3	3
7	Terwujudnya peningkatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi	Kontribusi Energi Baru Terbarukan terhadap total bauran energi (%)	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57

Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020 sebelum perbaikan

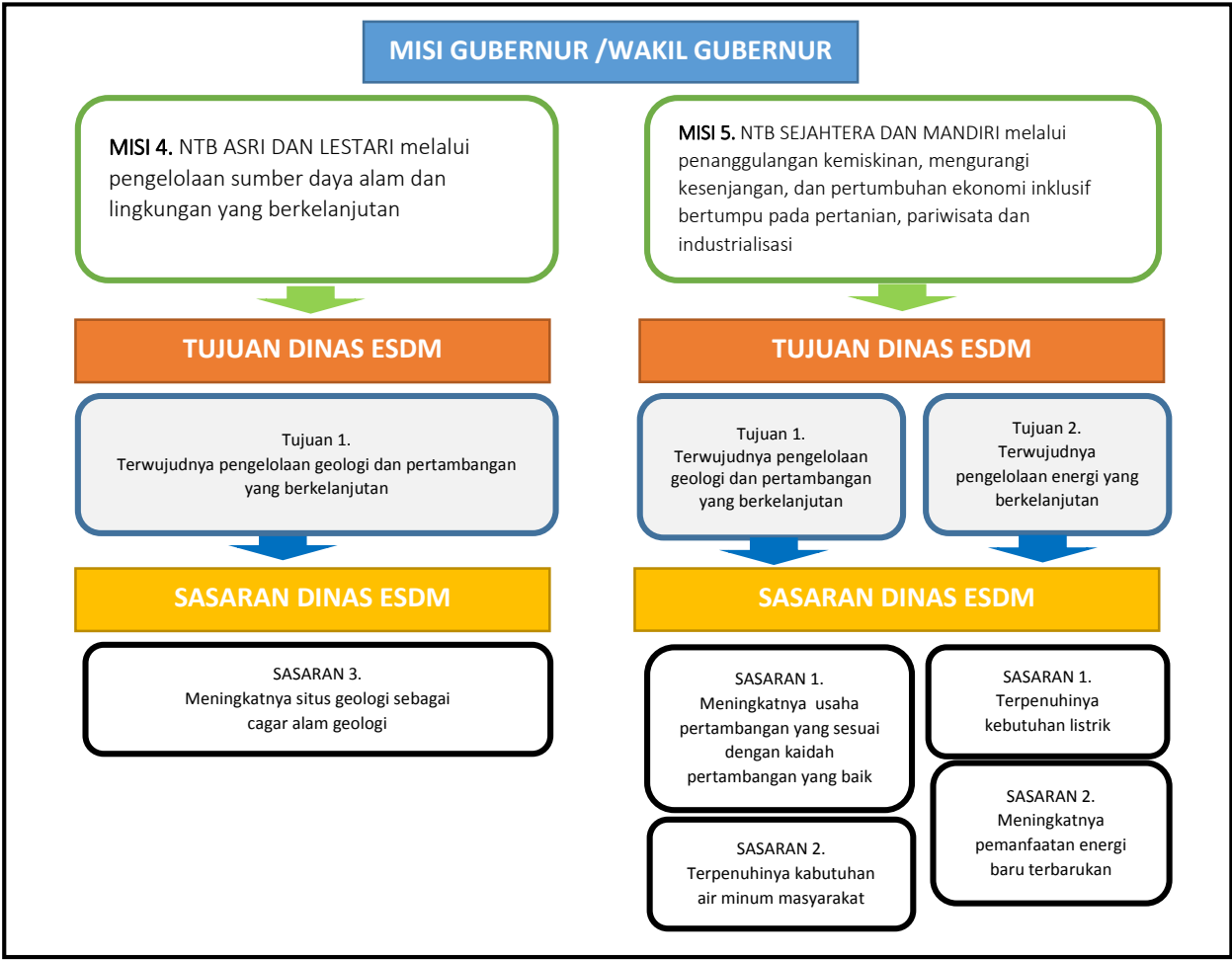
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Layanan Listrik	a.	Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik)	94,46 %
2.	Mendukung Terwujudnya Peningkatan Cakupan Air Bersih	a.	Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai	2040 KK

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp. 2.482.749.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 1.6 sesuai misi ke 5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023
2.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Rp. 191.868.500	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp. 641.017.500	
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Rp. 6.765.961.200	
5.	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Rp. 128.537.700	

B. SETELAH PERBAIKAN

Sesuai dengan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Provinsi NTB telah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi menjadi :

Keterkaitan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Taun 2019-2023



Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pengelolaan geologi dan pertambangan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentasi pemegang IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (%)	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
			Terpenuhiya kabutuhan air minum masyarakat dari sumber air tanah	Jumlah masyarakat yang terlayanaai air minum dari sumber air tanah (KK)	2040	255	255	255	425
			Meningkatnya sutus geologi sebagai cagar alam geologi	Persentase situs geologi yang termanfaatkan (%)	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya pengelolaan energi yang berkelanjutan	Konsumsi listrik perkapita (kWh/kapita)	Terpenuhiya kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07	14.17	15.76	17.43	19.18

Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020 setelah perbaikan perbaikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (<i>Good Mining Practice</i>)	4,00 %
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	95,09 %
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat yang terlayani air minum dari sumber air tanah	1.190 KK
4.	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 Situs
5	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	6,62 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp. 439.555.089,50	Sumber dana APBD, mendukung Misi ke-4 dan Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan sasaran meningkatnya pengelolaan Geopark dan terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin.
2. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp. 3.933.059.000	
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Rp. 4.169.350.000	
4. Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Rp. 264.776.600	
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Rp. 1.318.490.300	